

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak naiknya Duterte sebagai presiden Filipina yang ke 16 di tahun 2016, arah kebijakan luar negeri Filipina cukup banyak melalui perubahan. Awalnya, Filipina di bawah Duterte membawa pendekatan baru yakni menciptakan hubungan yang harmonis dengan Tiongkok. Terlepas dari adanya konflik teritorial antara kedua negara tersebut, Duterte tetap melakukan kerja sama dengan harapan mampu memberikan keuntungan secara ekonomi maupun meredam konflik tersebut untuk semakin memanas (Blanchard 2016). Pendekatan ini semakin kontroversial setelah Duterte memutuskan untuk memutus hubungannya dengan mitra strategisnya secara historis, Amerika Serikat. Salah satu perjanjian kunci antara Filipina-AS diputus akibat kemarah Duterte atas kritik AS terhadap kebijakan Perang Narkoba yang dibawanya. Kebijakan tersebut ialah Visiting Force Agreement atau VFA yang merupakan pakta militer yang menjadi dasar hukum dalam pelatihan dan latihan militer AS-Filipina guna meningkatkan kemampuan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) serta dilihat sebagai dasar dalam presensi AS di Asia (Galang 2020).

Secara historis, hubungan antara Filipina dan Amerika Serikat atau AS telah terbentuk sejak era kolonial. AS telah membantu Filipina dalam melawan penjajahan Spanyol pada abad 19 yang telah menduduki Filipina lebih dari tiga abad. Setelah berhasil mengusir Spanyol dari Filipina, AS menjadikan Filipina sebagai salah satu Pemerintahan Persemakmuran hingga merdeka pada 4 Juli 1946. Hubungan kedua negara ini terus berlanjut hingga era-era Perang Dunia, misalnya pada Perang Dunia II, AS turut membantu Filipina melawan penjajahan Jepang. Filipina juga ikut mendukung secara penuh segala kebijakan AS di era Perang Dingin, salah satunya yakni pembentukan SEATO. Berkat hal tersebut, hubungan keduanya sangat erat dalam bidang keamanan sehingga menjadikan keduanya sebagai partner strategis (Ngaibiakching 2018). Salah satu hubungan strategis dalam bidang keamanan antara kedua negara ini ialah Visiting Force Agreement

(VFA), terutama setelah memasuki abad 21. Paska klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan yang melanggar beberapa hak teritori negara-negara di Asia, salah satunya Filipina, VFA menjadi upaya Filipina-AS dalam melawan munculnya kekuatan baru Tiongkok tersebut. VFA menjadi dasar hukum dalam pelatihan dan latihan militer AS-Filipina guna meningkatkan kemampuan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) serta dilihat sebagai dasar dalam presensi AS di Asia.

Hubungan strategis kedua negara ini cukup bertahan hingga masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino III. Pada era Aquino III, aspek keamanan maritim menjadi sangat krusial terutama ketika memuncaknya permasalahan Laut Tiongkok Selatan. Meskipun Filipina sempat menjadikan Tiongkok sebagai sumber potensi ekonomi bagi negaranya, namun memuncaknya permasalahan justru menggeser pandangan Filipina dalam melihat Tiongkok yang berpotensi menjadi ancaman keamanan. Lantas, kesadaran akan hal ini membuat AS menjadi sosok penting dalam upaya preventif ekspansionisme Tiongkok. Aquino III berusaha untuk menarik kembali pengaruh AS melalui perjanjian Enhanced Defense Cooperation Agreement atau EDCA yang disahkan saat kunjungan Presiden Obama ke Filipina tahun 2014. EDCA ini merupakan hasil dari dialog bilateral antara AS-Filipina di tahun 2011 yang merupakan kerangka kerja sama untuk memberikan akses atas presensi militer AS di Filipina baik itu kapal, pesawat, persenjataan serta akses yang lebih besar ke pangkalan militer Filipina (Lum & Dolven 2014 dalam Ngaibiakching 2018). Kesepakatan ini juga atas pertimbangan AS yang melihat Filipina masih sebagai relasi strategisnya di kawasan Asia Pasifik serta sejalan dengan kepentingan politik AS disana yakni *'Pivot to Asia'* (Greitens 2016).

Paska turunnya Benigno Aquino III dan digantikan oleh Rodrigo Duterte, hubungan yang erat tersebut justru berbalik arah. Duterte lebih mengarahkan kebijakan dan relasinya ke arah Tiongkok. Negara yang dianggap sebagai ancaman akibat dari sengketa teritorial LTS, justru didekati oleh Duterte dan meninggalkan mitra lamanya, AS. Hal ini terlihat sejak awal pemerintahannya di tahun 2016, Duterte langsung mengunjungi Tiongkok pada bulan Oktober di tahun tersebut. Pada beberapa kesempatan juga, Duterte banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan

terkait dengan hubungannya dengan AS. Misalnya pada pertemuan Pebisnis Tiongkok dan Filipina di *Great Hall of the People* yang dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Tiongkok, Zhang Gaoli, Duterte mengatakan “In this venue, your honors, in this venue, I announce my separation from the United States” (Blanchard, 2016). Namun pada kunjungan kali ini, Filipina di bawah Duterte masih terlihat menarik simpati guna memperlancar kerja sama yang akan dibentuk dengan Tiongkok, baik dari segi ekonomi maupun militer terutama terkait permasalahan LTS.

Arah kebijakan Filipina yang berubah ini juga dipicu oleh kritik-kritik AS terhadap kebijakan Perang Narkoba Duterte. Pemerintahan Obama sempat mengkritik terkait kebijakan tersebut dan disampaikan pada konferensi pers pada penghujung ASEAN Summit di Laos, September 2016, bahwa Amerika Serikat akan tetap mempertahankan posisinya melawan Perang Narkoba Filipina yang tidak konsisten dengan supremasi hukum dan penghormatan HAM (Placido, 2016). Bahkan, Duterte sempat mengutuk Obama dengan kata-kata kasar sebagai reaksi dari kritik atas kebijakannya tersebut. Hubungan ini justru semakin parah ketika masa pemerintahan Donald Trump. Meskipun sempat membaik di awal, tak lama kemudian, hubungan ini kembali menegang paska Departemen Luar Negeri AS mencabut visa untuk Ronald de la Rosa, seorang senator mantan kepala Polisi Nasional Filipina yang telah memainkan peran sentral dalam Perang Narkoba (Kurlantzick, 2020). Hal ini memicu kemarahan dari Duterte yang kemudian melarang dua senator Amerika Serikat untuk berkunjung ke Filipina. Duterte kemudian memutus VFA yang merupakan Pakta Militer kunci bagi Amerika Serikat dalam melawan kekuatan Tiongkok di Asia (Kurlantzick, 2020).

Namun paska terciptanya hubungan erat antara Filipina-Tiongkok di era Duterte, arah kebijakan Duterte yang bisa dikatakan cukup kontroversial ini justru berubah kembali lagi ke mitra historisnya, Amerika Serikat. Hal ini ditandai dengan pembatalan pemutusan VFA oleh Duterte di Juli 2021 setelah pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin (Ali & Lema, 2021). Meskipun pada dasarnya pemutusan kerja sama tersebut sempat ditunda dua kali, namun pembatalan pemutusan tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan hubungan

Filipina dengan mitra lamanya AS. Dengan adanya inkonsistensi dari arah kebijakan tersebut, penelitian ini akan mencoba untuk melihat hal apa saja yang menjadi pendorong dari perubahan kebijakan Duterte di tahun akhir ia menjabat sebagai presiden Filipina.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian ini ialah mengapa Filipina melanjutkan kerja sama VFA setelah sebelumnya sempat mengancam untuk memutuskan kerja sama tersebut dan condong ke Tiongkok?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk meneliti lebih dalam alasan di balik pengambilan kebijakan Filipina oleh Duterte untuk membatalkan pemutusan kerja sama VFA dan kembali berhubungan dengan AS setelah bersifat agresif terhadap AS dan membangun hubungan yang erat dengan Tiongkok.

1.4. Kerangka Teori

1.4.1. Realisme Neoklasik

Realisme neoklasik menjadi pengisi kekosongan dan memperbaiki poin-poin yang luput dibahas oleh teori realisme sebelumnya, yakni bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan luar negeri oleh suatu negara terbentuk dengan melihat faktor-faktor internasional serta faktor domestik dari suatu negara (Dawood 2016). Realisme neoklasik melihat adanya faktor internal yang yakni unit-unit domestik terutama dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Karena menurut realisme neoklasik, faktor eksternal yang ada tidak secara langsung berpengaruh pada perilaku negara, namun sebagai pijakan awal yang menetapkan limitasi strategi serta hasil yang bisa didapatkan negara. Sedangkan faktor internal merupakan langkah lebih lanjut yang kemudian menghasilkan bagaimana perilaku negara dalam merespon permasalahan eksternal, melalui analisis unit-unit domestik. Hal inilah yang mendasari perbedaan kebijakan suatu negara dengan negara lainnya, karena adanya faktor internal spesifik yang berbeda antar negara.

Lebih lanjut, realisme neoklasik menggunakan dua variabel guna menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara, yakni dengan variabel independen yaitu sistem internasional dan *intervening variable* yaitu *leader's image* atau persepsi pemimpin, kultur strategis, hubungan pemerintah-masyarakat, dan pengaturan kelembagaan domestik (Ripsman et al 2016). Posisi suatu negara dalam sistem internasional serta kapabilitas kekuatan material yang relatif menjadi dasar awal yang penting untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Sedangkan *intervening variable* merupakan faktor domestik yang mempengaruhi kebijakan secara khusus. Melalui kedua variabel ini, terlihat bahwa tujuan utama dari realisme neoklasik adalah untuk mengetahui bagaimana distribusi kekuasaan dalam sistem internasional, motivasi dan struktur subjektif negara terhadap sistem internasional membentuk kebijakan luar negeri mereka (Firoozabadi & Ashkerazi 2016).

Independen variabel dan *intervening variable* tersebut kemudian menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri yang merupakan hasil dari interaksi kedua variabel pertama ini merupakan variabel dependen dari realisme neoklasik. Terdapat tiga tipe dari ruang lingkup kebijakan luar negeri menurut realisme neoklasik. Pertama yakni tipe I yang merupakan kebijakan krisis atau dalam waktu yang singkat seperti hitungan hari, minggu, ataupun bulan. Tipe II sendiri merupakan kebijakan waktu menengah yang biasanya dihasilkan dalam kurun waktu beberapa bulan atau tahun. Terakhir tipe III untuk kebijakan jangka panjang yang biasanya dihasilkan dalam kurun waktu beberapa tahun ataupun dekade. Ketiga tipe ini mampu membantu penelitian dalam memilih *intervening variable* apa yang tepat untuk digunakan ketika dalam jangka waktu tertentu (Ripsman et al 2016).

1.4.1.1. Independen Variabel: Sistem Internasional

Pada dasarnya, sistem internasional bagi realisme neoklasik tidak jauh berbeda dari teori-teori lainnya yakni sebuah sistem yang terdiri dari unit-unit yang saling berinteraksi. Realisme neoklasik pun melihat bahwa negara merupakan unit primer yang ada di sistem internasional. Meskipun terdapat unit atau aktor lainnya, namun realisme neoklasik masih berpegang teguh pada negara yang merupakan aktor

dengan konsekuensi politik terbesar (Rose 1998). Terdapat dua hal yang patut dipahami dalam melihat sistem internasional melalui kacamata realisme neoklasik, pertama yakni dalam sistem internasional terdapat struktur yang kemudian mampu memlimitasi berbagai respon strategis serta hasil-hasil dari hubungan yang terjadi, namun sistem tersebut tidak dapat secara spesifik mengatur perilaku unit-unit di dalamnya. Kedua, sistem dengan tata kelola anarki pada dasarnya menciptakan kondisi yang tidak pasti terhadap unit-unit di dalamnya. Dalam artian, permasalahan dapat muncul secara tiba-tiba di dalam sistem, sehingga menciptakan unit-unit yang berlandaskan *self-help* (Ripsman et al 2016).

Struktur yang ada dalam sistem internasional ini kemudian memberikan limitasi pada negara-negara sehingga berpengaruh pada distribusi kekuatan yang berbeda-beda antara unit-unit dalam sistem internasional. Distribusi kekuatan yang relatif ini menghasilkan negara-negara dengan kekuatan yang berbeda-beda pula. Layaknya realisme lain, realisme neoklasik menggunakan sebutan ‘polaritas’ untuk menunjukkan tren negara-negara yang memiliki kekuatan besar. Tren tersebut dapat berupa unipolar atau satu negara adidaya, bipolar atau dua negara adidaya, atau multipolar yakni tiga negara atau lebih. Negara-negara ini dinobatkan sebagai adidaya ketika memiliki control atas komponen material kekuatan yang cukup serta sarana politik dan birokrasi untuk mengekstraksi dan memobilisasi sumber daya tersebut bila diperlukan. Komponen material kekuatan ini diukur melalui indikator-indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pengeluaran pertahanan tahunan, ukuran serta komposisi Angkatan bersenjata, penelitian dan pengembangan di bidang militer, jumlah populasi dan tren demografi, sumber daya alam, serta luas teritori (Ripsman et al 2016).

1.4.1.2. Intervening variable: Leader’s Image & State-Society Relation

Intervening variable digunakan untuk mencari koneksi antara sistem internasional dan perilaku negara, hal ini sesuai dengan pernyataan Rose (1998) bahwa “*systemic pressures must be translated through intervening variables at the unit level*”. Dalam tulisan Ripsman et al (2016), ia mengkategorikan intervening variable pada tingkat

unit berupa *leader's image* atau citra pemimpin, kultur strategis, relasi pemerintah-masyarakat, dan pengaturan lembaga domestik.

Untuk memilih intervening variable yang tepat, Ripsman et al (2016) menggunakan bantuan variable dependen yakni berdasarkan jangka waktu kebijakan tersebut. Dijelaskan bahwa dalam pembuatan kebijakan yang membutuhkan waktu singkat seperti tipe I dan II, peran dari citra pemimpin dan kultur strategis menjadi dominan terutama dalam kondisi krisis. Posisi intervening variable lainnya seperti relasi pemerintah-masyarakat dan institusi domestik kemudian akan semakin signifikan jika telah masuk waktu menengah dan jangka panjang. Hal ini dikarenakan peranan pemimpin akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Sehingga, faktor domestik lainnya tersebut akan lebih berpengaruh.

Namun meskipun begitu, tidak ada konsensus akademis dalam menetapkan teorisasi kerangkanya, baik dari penentuan serta cara menggunakan intervening variable yang spesifik (He & Feng, 2013). Di satu sisi, hal ini membuat pendekatan ini terkesan memiliki penjelasan yang bersifat *ad hoc*, namun jika dipahami lebih lanjut mampu menjadi penjelasan yang fleksibel dan dapat fokus ke isu yang spesifik sesuai dengan kondisi pembuatan kebijakan luar negeri. Sebagai contoh, dalam tulisan Fareed Zakaria (1998) yang meneliti tentang “why the United States did not expand more and sooner in the twentieth century compared to its European counterparts by opening up the “blackbox” of the state”, ia menemukan bahwa kondisi desentralisasi, difusi, serta struktur politik yang terbagi pada AS menyebabkan terhalangnya transformasi kebijakan kapabilitas kekuatan menjadi kebijakan ekspansi. Dalam penelitiannya tersebut ia menggunakan variabel tingkat unit yang berupa ‘struktur system politik demokrasi’. Dalam tulisannya Thomas Christensen (1996) juga, ia berargumen bahwa permusuhan Sino-American di awal Perang Dingin merupakan ciptaan para pemimpin dari kedua pihak sebagai upaya mobilisasi bantuan domestik. Argumennya ini diteliti menggunakan kepedulian pemimpin atas permasalahan domestik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya fleksibilitas mampu membantu mencari ‘*transmission belt*’ dari tingkatan unit

sebagai mekanisme kausal yang menghubungkan efek sistemik dengan kebijakan negara (He & Feng, 2013).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua *intervening variable* yakni citra pemimpin dan *state-society relation* atau hubungan negara-masyarakat. Penulis melihat adanya kondisi krisis di era pandemi dan mengharuskan Filipina untuk mengambil solusi cepat. Namun, peran dari hubungan negara-masyarakat juga penting akibat dari adanya perubahan arah kebijakan setelah beberapa tahun Duterte menjabat sebagai pemimpin Filipina.

Membahas mengenai persepsi pemimpin, dalam tulisannya Ripsman et al (2016) pemimpin dilabeli dengan sebutan *foreign policy executive* atau FPE yang terdiri dari presiden, perdana menteri, diktator, anggota kabinet utama, menteri, dan penasihat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan luar negeri dan pertahanan. FPE ini menjadi penting karena mereka memiliki monopoli informasi terkait negara lain yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga FPE mampu menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih tepat dan dibutuhkan, terutama di saat krisis. Hal yang berperan penting dalam hal ini ialah persepsi pemimpin tersebut. Pandangan seorang pemimpin mampu menjadi basis kognitif yang digunakan dalam memproses informasi tertentu dan menghasilkan suatu kebijakan luar negeri (Meibauer 2019).

Kemudian relasi negara-masyarakat atau *state-society relation*. *Intervening variable* ini membahas mengenai harmonisasi antara pemerintah dan masyarakatnya. Hal ini merujuk pada tingkat kepatuhan, perselisihan, hingga dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dicetuskan negara. Faktor-faktor ini mampu memberi dampak pada kemampuan pemimpin negara untuk mengekstrak, memobilisasi, serta memanfaatkan kekuatan bangsa (Ripsman et al 2016). Implementasi dari kebijakan menjadi perhatian utama, jika terdapat kecurigaan masyarakat dan menolak akibat adanya gangguan atas hak dan sumber daya, maka suatu kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Bahkan, jika suatu pemerintah tetap memaksakan kebijakan yang bertolak belakang tersebut, mampu mengancam keberlangsungan rezim dan bahkan negara itu sendiri.

Dalam memberikan pengaruhnya tersebut, aktor-aktor masyarakat tidak secara menyeluruh mampu memberikan pengaruh yang signifikan. Dalam Lobell et al (2009), dijelaskan bahwa aktor-aktor yang dapat memberikan pengaruh signifikan haruslah mampu memberikan imbalan setimpal jika kebijakan yang disarankan terimplementasi, ataupun mampu memberikan hukuman yang cukup jika kebijakan tersebut ditolak. Dalam konteks ini misalnya kelompok-kelompok konglomerat ataupun kelompok kepentingan yang memiliki sumber daya dalam jumlah besar bahkan militer. Namun, dalam kondisi pemerintahan yang rentan seperti adanya kemungkinan kekalahan eleksi, kudeta militer, ataupun kekalahan dalam aspek-aspek pemilihan, maka peran masyarakat lebih mencakup secara luas. Pemerintah akan lebih memperhatikan opini-opini publik seperti jajak suara publik guna menyelaraskan dengan kepentingan nasional yang diinginkan masyarakat secara luas dan mempertahankan posisinya (Ripsman et al 2016).

1.5. Argumentasi

Berdasarkan kerangka teori diatas, peneliti berargumen bahwa inkonsistensi arah kebijakan luar negeri Filipina dikarenakan oleh adanya dinamika domestik sebagai *intervening variable* dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pertama, perubahan persepsi Duterte terkait kegagalan Tiongkok dalam kerja samanya dan signifikansi vaksin AS guna memulihkan ekonomi Filipina di era Pandemi. Kedua, kritik dan dorongan dari masyarakat karena ketidakpuasan atas kebijakan *pivot to china*. Ketiga, upaya meningkatkan dukungan Duterte guna menyukseskan penerusnya yakni Sara Duterte-Carpio di pemilu selanjutnya.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1. Inkonsistensi Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), inkonsisten berarti tidak bersesuaian, bertentangan, ataupun kontradiktif. Dalam konteks kebijakan, berarti terdapat suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi awal kebijakan tersebut. Inkonsistensi kebijakan dalam penelitian ini merujuk pada ketidaksesuaian arah kebijakan

Duterte di awal dan menuju akhir masa pemerintahannya. Duterte yang awalnya secara penuh mendekatkan diri dengan Tiongkok dan menjauhkan diri dari AS justru kembali lagi berhubungan dengan mitra lamanya tersebut. Peneliti melihat kembalinya Filipina ke AS ini cukup kontradiktif dengan bagaimana sikap agresifnya kepada AS di awal pemerintahan Duterte.

1.6.1.2. Perubahan Persepsi Ancaman

Persepsi ancaman merupakan sebuah kondisi individu yang melihat suatu situasi bersifat negatif dan adanya keperluan untuk melindungi diri (Redmond dalam Gustiana 2014). Dalam artian, persepsi ini menjadi faktor penting dalam pembuatan sebuah kebijakan. Taliafero dalam Lobell et al (2009) menjelaskan bahwa pemerintah membuat suatu pilihan kebijakan berdasarkan persepsi dan kalkulasinya atas kondisi kekuatan relatif dan intensi negara lain. Di tahun menuju akhir masa jabatan Duterte, Tiongkok justru meningkatkan ancamannya terhadap Filipina. Persepsi Duterte yang awalnya akan meredakan konflik regional dan mendapatkan keuntungan ekonomi secara masif justru tidak terealisasi. Tiongkok semakin menunjukkan intensinya untuk menguasai wilayah LTS. Hal ini mendorong terjadinya perubahan persepsi Duterte dan mempengaruhi arah kebijakannya.

1.6.1.3. Pemulihan Ekonomi

Era pandemi menyebabkan banyak negara di dunia mengalami krisis ekonomi, termasuk Filipina. Kondisi yang mengharuskan adanya *lockdown* berdampak pada rusaknya roda perekonomian. Sebagai turunan dari teori realisme, neoklasik realisme juga melihat adanya kondisi *self-help* negara-negara dalam beradaptasi dari pandemi. Melalui adanya pengaruh faktor domestik, negara akan berkompetisi dalam mencari cara untuk mengembalikan kondisi seperti semula (Basrur & Kliem 2021). Dalam konteks ini, Filipina terlihat melakukan *balancing* antara Tiongkok dan AS guna meningkatkan keuntungannya dalam mendapatkan sumber bantuan vaksin. Hal ini didorong oleh peran vaksin yang sangat signifikan dalam mencegah

penyebaran virus sehingga mampu mendorong terjadinya pemulihan ekonomi akibat dari krisis.

1.6.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah eksplanatif karena bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Dalam kasus ini, fenomena yang akan dijelaskan ialah inkonsistensi arah kebijakan Filipina terkait hubungannya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok di era pemerintahan Rodrigo Duterte.

1.6.3. Ruang Lingkup Penelitian dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini akan berfokus pada era pemerintahan Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina tahun 2016 hingga 2022. Namun, tidak menutup kemungkinan dibutuhkan data lain di luar era pemerintahan Duterte sebagai presiden, misalnya terkait dengan kebijakan *drug war* yakni era Duterte sebagai walikota Kota Davao.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti ialah studi literatur dan kepustakaan. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Primer berasal dari pernyataan resmi Pemerintahan Filipina yang dihimpun dalam situs resmi, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, situs berita daring, artikel daring yang sesuai dan berkorelasi dengan topik yang diangkat.

1.6.5. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan terdiri dari lima bab. Setelah Bab I yang berisi pendahuluan, kemudian masuk pada bab II yang berisikan dinamika hubungan Filipina dengan AS dan Tiongkok di era Duterte. Bab ini akan menjelaskan inkonsistensi dari arah kebijakan Duterte, yakni awal pemutusan VFA, komitmen Duterte untuk Pro-Tiongkok, dan kembali baiknya hubungan Filipina-AS. Bab III berisi permasalahan yang dihadapi Filipina, secara domestik maupun internasional. Permasalahan yang akan dibahas di bab III ini merupakan permasalahan di era pemerintahan Rodrigo

Duterte. Bab IV berisikan analisis terkait inkonsistensi arah kebijakan Filipina di era Duterte menggunakan teori realisme neoklasik. Bab V berisikan kesimpulan penelitian.